

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Effendi, Tolib, 2015, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir dan Apriyanto Nusa, 2017, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Nawawi, Hadari, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Sukinta, 1997, *Beberapa Perbedaan Penting antara KUHP dan HIR*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Zulfa, Eva Achjani, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.

## **B. SKRIPSI/PENELITIAN/JURNAL**

Amdani, Yusi, “Implikasi Penafsiran Undang-undang oleh Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015.

Marfuatul Latifah, “Putusan Praperadilan Hadi Poernomo dan Implikasinya terhadap Kewenangan Pemberantasan Korupsi KPK”, *Info Singkat Hukum*, Volume VII, Nomor 11/I/P3DI/Juni/2015.

- Narimo, Agung, 2018, *Tinjauan Yuridis Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan (Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Nasir, Gamal Abdul, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Republik*, Volume 5 Nomor 2, September, 2017.
- Payuse, I Nyoman Aji Duranegara, 2013, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan dalam Mencegah Residivisme*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Plangiten, Maesa, “Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 6, Oktober, 2013.
- Purba, Kombes Pol (P). Zakarias, dkk., 2014, *Cold Cases: Apa dan Bagaimana*, Draft Hasil Penelitian, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta Selatan.
- Rahim, Arhjayati, “Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Volume 05, Nomor 01, 2012.
- Septiana, *et al.*, 2013, “Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan yang Melampaui Kewenangan Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel atas Nama Bachtiar Abdul Fatah)”, Hasil Penelitian, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumelang, Christy Paskahlis, “Kedudukan SPDP dalam Prapenuntutan berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP))”, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 3, April, 2018.

Supriyadi, “Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, Februari, 2010.

Susak, Oktein Josephus, “Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tahun 2015”, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 1, April 2016.

Triwibowo, Cahyo Adi, 2015, *Pelaksanaan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### C. INTERNET

Hukumonline.com, “Klinik: SP3”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl624/sp3>, diakses 27 September 2018.

Institute for Criminal Justice Reform, “Mendudukan *Nebis In Idem* dalam Praperadilan Indonesia”, <http://icjr.or.id/mendudukan-nebis-in-idem-dalam-praperadilan-indonesia/>, diakses 9 Februari 2019.

Kabar24, “Kasus Century: Putusan Pengadilan atas Boediono Sulit Dilaksanakan”, <http://kabar24.bisnis.com/read/20180412/15/783585/kasus-century-putusan-pengadilan-atas-boediono-sulit-dilaksanakan>, diakses 4 Juli 2018.

Kompas.com, ““KPK Pastikan Pemeriksaan Miranda Bagian dari Penyelidikan Baru Kasus Century””, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/14/06540211/kpk-pastikan-pemeriksaan-miranda-bagian-dari-penyelidikan-baru-kasus-century>, diakses 1 April 2019.

Kompas.com, “KPK Mintai Keterangan Mantan Wapres Boediono Terkait Bank Century”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/15/>

*11072971/kpk-mintai-keterangan-mantan-wapres-boediono-terkait-bank-century*, diakses 1 April 2019.

Kumparan.com, “KPK Tetap Laksanakan Putusan Praperadilan Century Meski Dianggap Salah”, <https://kumparan.com/@kumparannews/kpk-tetap-laksanakan-putusan-praperadilan-century-meski-dianggap-salah>, diakses 18 Oktober 2018.

Mahkamah Konstitusi, “MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#.WzsYFdUza00> diakses 3 Juli 2018.

Marcus Priyo Gunarto, “Polemik Perintah Penetapan Tersangka”, <http://mediaindonesia.com/read/detail/155747-polemik-perintah-penetapan-tersangka>, diakses 25 Oktober 2018.

Merdeka.com, “Alasan Hakim Kabulkan Praperadilan, BG Bukan Penyelenggara Negara”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/alasan-hakim-kabulkan-praperadilan-bg-bukan-penyelenggara-negara.html>, diakses 3 Juli 2018.

Mudzakir, “Perintah Hakim Sebagai Terobosan Hukum”, <https://www.watyutink.com/opini/Perintah-Hakim-Sebagai-Terobosan-Hukum>, diakses tanggal 3 April 2019.

Tempo.co, “KPK Klaim Alami Kemajuan dalam Penyelidikan Kasus Bank Century”, <https://nasional.tempo.co/read/1149943/kpk-klaim-alami-kemajuan-dalam-penyelidikan-kasus-bank-century>, diakses 1 April 2019.

Viva.co.id, “Kasus Budi Gunawan Dilimpahkan ke Kejaksaan Agar Bisa SP3?”, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/596391-kasus-budi-gunawan-dilimpahkan-ke-kejaksaan-agar-bisa-sp3>, diakses 17 Oktober 2018.

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Yogyakarta Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9).

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 429).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

## **E. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 Desember 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 Mei 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012 perihal Pengujian KUHAP terhadap UUD NRI 1945, 21 Mei 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel perihal Permohonan Praperadilan atas Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, 16 Februari 2015.

Putusan Mahkamah Agung No. 861 K/Pid.Sus/2015 perihal Kasasi Perkara Budi Mulya, 8 April 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 April 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. perihal Permohonan Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka, 26 Mei 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 12/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel perihal Permohonan Praperadilan atas Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan secara Materiil Perkara Bank Century, 10 Maret 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. perihal Penghentian Penyidikan Tidak Sah Perkara *Cessie* Bank Bali, 12 April 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 99/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. perihal Penghentian Penyidikan Tidak Sah Kasus Korupsi dan TPPU Proyek Pasar Besar Madiun, 9 Oktober 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. perihal Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Perkara Bank Century, tanggal 9 April 2018.